



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI KOESTANTO**
2. Jabatan : **SENIOR VICE PRESIDENT**
3. NHK : **259935**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 11.620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.005.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 905.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 865.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.090.000.000
5. Bangunan Seluas 19 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
6. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.525.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/252 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.935.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/225 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.765.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 110.000.000



1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	57.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.635.896.727
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.655.780.555
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.464.332.888
Sub Total	Rp.	17.543.760.170
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.543.760.170

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.